

**PENGANTAR BAHASA DAERAH DI SEKOLAH
UPAYA PERTAHANAN BUDAYA BANGSA *)**

Dingding Haerudin **)

PERLU KITA MAKLUMI, bahwa suku bangsa di manapun di bumi pertiwi ini tidak akan merelakan begitu saja kehilangan identitas budaya daerahnya. Manusia Indonesia sejati akan selalu memelihara warisan leluhurnya, mensyukuri ciptaan-Nya. Itulah bahasa daerah. Walau cendekiawan sekaliber apapun tidak akan pernah mampu menciptakan sebuah bahasa yang menjadi ciri kelompok etnik dalam kebinekaan.

Layaknya bahasa daerah di kepulauan Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Jawa, atau yang lainnya adalah aset kekayaan nasional yang bermartabat bagi kelompok etiknya, bagi bangsanya, dan bagi negaranya. Begitu juga bahasa ibu/daerah (Sunda) dan dialek daerah lainnya di Jawa Barat, akan tetap dan selalu dipelihara oleh masyarakatnya.

Dalam perspektif sosiopolitik-linguistik, perkembangan repertoar dan perubahan gejala kebahasaan masyarakat Indonesia, dari ekabahasaan yang berbahasa ibu bahasa daerah menjadi dwibahasawan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, merupakan gejala yang sangat menarik untuk dikaji dan "dipersoalkan" secara terus menerus. Gejala tersebut akan selalu merangsang untuk dikaji bagi bangsa Indonesia, semboyan *bhineka tunggal ika* tetap dipertahankan, keanekaragaman bahasa daerah tetap diberi ruang dan hak hidup berdampingan dengan bahasa nasional.

Di antara bahasa-bahasa daerah di Indonesia ini memang ada yang hanya menyisakan segelintir penutur tua dan secara lingual tidak interaktif lagi antargenerasi. Banyak generasi muda berpendidikan tinggi dan tingkat mobilitasnya pun tinggi, tidak mampu lagi berbicara dan berdialog dalam bahasa daerah dengan generasi tuanya dalam hal adat dan budaya lokal.

**

BAHASA SUNDA DI JAWA BARAT hingga kini masih dipelihara oleh pemerintah dan masyarakatnya. Perkara yang menunjukkan bahwa bahasa daerah di Jawa Barat masih dipelihara adalah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003, tentang pelestarian Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah. Lebih lanjut pada PP tersebut tersurat bahwa Dinas (Diknas) memfasilitasi penggunaan bahasa pengantar pendidikan dari pengajaran di kelas-kelas permulaan (1-3) sekolah dasar dan taman kanak-kanak.

Bahkan sebagai mata pelajaran, kini pengajaran bahasa daerah di sekolah bukan lagi sebagai mata pelajaran mulok wajib. Terlebih setelah adanya keputusan Kongres Bahasa Sunda (KBS) VII tahun 2001, yang mewajibkan pengajaran bahasa daerah (Sunda) di Jawa Barat diajarkan setara pentingnya dengan mata pelajaran lainnya. Sesuai dengan hakekat kebijakan Otonomi Daerah, KBS VII mengamatkan agar sebutan pengajaran "muatan lokal" pada kurikulum ditiadakan.

Ketika bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah, akan erat kaitannya dengan proses menanamkan budi pekerti pada anak didik. Saat itu mereka belajar memahami nilai-nilai budayanya, yang di

dalamnya terdapat norma-norma yang mencerminkan nilai rasa bahasa yang berbeda dengan bahasa lainnya.

Pada saat itu pula mereka beroleh kesempatan untuk menerima informasi resmi berupa ilmu pengetahuan dengan bahasa daerah (bahasa ibu). Hal ini sejalan dengan yang diputuskan dalam *The Use of Vernacular Languages in Education*, (1951) bahwa anak jangan diputuskan dari bahasa ibunya ketika ia memasuki kelas-kelas awal di sekolah dasar, karena di samping ia terampil berbahasa etniknya, ia pun akan mengenal jati dirinya.

Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak didiknya. Mereka diharapkan mampu mengapresiasi dan mengekspresikan kembali pengetahuan yang ia pelajarnya baik lisan maupun tulis. Dengan kata lain memiliki pengalaman menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dengan bahasa daerah tentang ilmu yang dipelajarnya.

Hingga akhirnya, di samping memperoleh pengetahuan umum, mereka juga mampu menyesuaikan dengan struktur sosialnya, norma-norma, konsep-konsep, dan bentuk-bentuk bahasa daerah yang dipergunakannya. Hal tersebut secara berangsur-angsur berubah menjadi kemampuan berkomunikasi dan kemampuan mengorganisir tingkah lakunya berbahasanya.

Agar anak didik mampu berkomunikasi di dalam bahasa daerahnya, sejak dini mereka harus dilatih lebih banyak menggunakan. Sehingga pada diri mereka melekat kebiasaan yang baik dalam mensikapi bahasa daerahnya. Kebiasaan yang baik itu, menjadikan bekal berharga bagi dirinya ketika mensikapi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan maupun bahasa lainnya yang ia dipelajari.

**

UNTUK memenuhi harapan di atas, guru yang mengajar di SD dan TK harus memiliki kemampuan berbahasa daerah setempat dimana ia mendidik. Di Jawa Barat, guru harus menguasai bahasa Sunda. Bekal kemampuan berbahasa Sunda itu didapatkan ketika ia mengikuti sekolah guru di LPTK. Dengan demikian, LPTK yang menyelenggarakan program PGSD atau PGTK harus memberikan mata kuliah bahasa dan sastra Sunda kepada mahasiswanya.

Bahasa daerah di SD, di samping digunakan sebagai bahasa pengantar, juga dijadikan mata pelajaran dari kelas 1-6, dan porsi perminggunya 2 jam pelajaran. Guru SD yang hingga kini dikenal dengan sebutan guru borongan, tidak mungkin akan mampu melakukan kegiatan belajar mengajar dengan pengantar bahasa Sunda. Ia juga akan mendapatkan kesulitan memberikan materi pelajaran bahasa Sunda, bila sebelumnya ia tidak pernah memperoleh pengalaman belajar bahasa itu. Seperti bahasa-bahasa lainnya, pada bahasa Sunda pun memiliki metode pembelajaran bahasanya.

Menciptakan gairah belajar siswa ketika proses belajar mengajar menggunakan pengantar bahasa daerah bukan pekerjaan mudah bagi seorang guru. Guru tersebut harus seorang profesional. Paling tidak ia pernah

mempelajari mata kuliah bahasa dan sastra Sunda ketika di sekolah guru, seperti di PGSD atau PGTK.

Oleh karena itu, langkah yang tepat bila mata kuliah bahasa dan sastra daerah (Sunda) diberikan kepada mahasiswa program PGSD maupun PGTK UPI. Mata kuliah tersebut akan menjadi ciri khas UPI yang berkedudukan di Jawa Barat. Dengan adanya mata kuliah bahasa dan sastra daerah, berarti mendukung Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 tentang pelestarian Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah.

Berkaitan dengan kebutuhan guru di Jawa Barat yang hampir mencapai 3.800 orang, diharapkan lulusan PGSD dan PGTK UPI yang telah memperoleh mata kuliah bahasa dan sastra Sunda diharapkan dapat menopang program pemerintah dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa Daerah. Hal itu diharapkan tidak hanya dilakukan oleh PGSD dan PGTK kampus pusat maupun kampus UPI daerah, tetapi di perguruan tinggi lainnya di negeri ini.

Dalam merespon perubahan dan perkembangan kurikulum, yaitu peralihan dari Kurikulum 1994 menjadi Kurikulum 2004, Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI telah menanggapi dan melakukannya. Tim yang dibentuk dari berbagai unsur, dan diprakarsasi oleh Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI, bekerja sama dengan *Lembaga Basa jeung Sastra Sunda (LBSS)*, dan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat, telah menyusun *Kurikulum 2004: Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda*. Penyusunan kurikulum tersebut yang diketuai oleh Prof. Dr. Iskandarwassid, dkk., dibawah konsultan Prof. Dr. Yus Rusyana, dkk.

**

TELAH banyak juga yang dilakukan oleh masyarakat di belahan dunia lain dalam upaya mempertahankan bahasa etniknya. Seperti yang dilakukan oleh Bruce Gaarder, sang pembela setia pemelihara/pelestari bahasa asli, pada U.S.Congress (1967), melontarkan kritiknya tentang pengeluaran dana sebanyak satu milyar dolar setiap tahunnya untuk mengajarkan berbagai macam ragam bahasa di sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Namun dana sebesar itu tidak memiliki dampak yang berarti untuk pelestarian dan pengembangan bahasa asli (daerah) anak didiknya. Karena selama itu, tidak pernah dilakukan upaya untuk memelihara dan mengembangkan keterampilan berbahasa asli anak didik-anak didiknya.

Juga hasil studi yang dilakukan Andersson (1965) menyatakan bahwa salah satu noda dan dosa kita (kaum pendidik) dalam dunia pendidikan adalah kegagalan kita dalam menghargai bahasa-bahasa dan budaya-budaya daerahnya. Karena begitu beratnya mempertahankan bahasa asli kelompok etnik, maka di bawah naungan Undang-undang Pendidikan Pertahanan Nasional 1958 (*National Defense Education Act of 1958*) di Spanyol, telah menyediakan beribu-ribu dollar bagi pembinaan dan pengembangan keterampilan berbahasa para guru yang bukan berbahasa Spanyol.

Ilustrasi di atas mengisyaratkan bagaimana sulitnya memelihara kekayaan budaya suatu bangsa. Oleh karena itu, secara konservatif, bahasa daerah di Jawa Barat hanya akan bisa bertahan dan berkembang melalui lembaga pendidikan. Salah satu indikasi keberadaan budaya suatu bangsa akan tampak secara jelas melalui bahasanya. Dengan digunakannya bahasa

daerah sebagai bahasa pengantar di SD kelas awal (1-3) dan TK, diharapkan di samping anak memperoleh ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, ia pun memiliki sikap positif terhadap bahasa aslinya sebagai identitas budaya daerahnya.

Oleh karena itu, berdiri tegaknya budaya suatu bangsa tidak bisa dilepaskan begitu saja dari peranan seorang guru. Sebagai ujung tombak, guru di lapangan memiliki beban yang maha berat dalam menciptakan insan akademis; menciptakan masyarakat yang tahu akan latar belakang sosialnya; dan menciptakan bangsa yang siap menghadapi kemajuan zaman, tanpa kehilangan jati dirinya.

Pada posisi sebagai pengganti kedua orang tuanya di rumah, kedudukan dan fungsi guru di sekolah menjadi panutan bagi anak didiknya dalam berbudi pekerti, membina watak manusia yang dapat memahami nilai-nilai kebenaran, dan menjadi figur yang digugu dan ditiru. Dalam hal ini, yang lebih awal dijumpai anak setelah kedua orang tuanya adalah guru sekolah dasar dan guru taman kanak-kanak.

Itulah harapan kita semua. Jangan sampai dalam posisi sebagai mata pelajaran pun, bahasa daerah di sekolah baru berlangsung secara intensif tatkala murid akan menghadapi tes akhir semester saja. Dan ketika itu dilakukan, kenyataannya bukan belajar berbahasa, tetapi murid belajar bagaimana mencari tahu isi dan tehnik menjawab soal dengan benar.

Kondisi empirik tersebut mengisyaratkan bahwa setiap proses pembelajaran berlangsung dalam seminggu, murid nyaris tidak sempat mendapatkan pengajaran bahasa daerah secara *daria* (serius), apalagi digunakan sebagai bahasa pengantar di SD pada kelas-kelas awal dan TK. Untuk menanggulangi hal itu, calon guru semestinya mendapatkan mata kuliah bahasa dan sastra daerah (Sunda) ketika ia menimba ilmunya di LPTK. Pembekalan materi tentang bahasa dan sastra Sunda beserta pengajarannya bagi guru-guru SD dan TK, baik dalam bentuk penataran maupun pelatihan pun perlu dilakukan secara intensif dan merata.

*) Pernah dimuat di HU Pikiran Rakyat

***) Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI